

Judul : 2 Prajurit TNI Ditahan: Indonesia Wajib Protes Malaysia
Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

2 Prajurit TNI Ditahan Indonesia Wajib Protes Malaysia



Bambang Soesatyo

DUA orang prajurit TNI Angkatan Darat, Kopda M Rizal dan Praka Subur, ditahan Polisi Diraja Malaysia. Mendengar hal ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo yang saat ini masih di Jenewa, Swiss, untuk mengikuti sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU), langsung bersikap. Dia meminta koleganya di Senayan segera melayangkan protes keras ke Pemerintah Malaysia atas penahanan itu.

Kopda M Rizal dan Praka Subur sejak Jumat lalu ditahan di Kantor Polisi di wilayah Lundu, Serawak. Oleh Polisi Diraja Malaysia, kedua anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 642/Kapuas ini disebut melanggar wilayah perbatasan dan dikaitkan dengan keberadaan motor ilegal.

"Saya meminta Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan untuk melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia yang telah menahan prajurit TNI selaku WNI yang dilindungi Negara Republik Indonesia yang berdaulat. Kemudian meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Malaysia tentang insiden tersebut," ucap politisi yang akrab disapa Bamsuet ini dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dia kemudian meminta Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, menggelar rapat gabungan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Duta Besar RI untuk Malaysia, Perwakilan TNI, Badan Legislatif

Kalimantan Barat. Tujuannya, untuk melakukan pencarian fakta atas dugaan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit dimaksud.

"Komisi I perlu mendorong Mabes TNI bekerja sama dengan Kemlu untuk berkoordinasi dengan perwira penghubung di Malaysia guna segera melakukan penyelidikan penyebab penahanan kedua prajurit TNI AD tersebut. Komisi I DPR juga harus mendorong Kemlu memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI dan International Labour Organization (ILO) RI guna melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD itu," kata politisi Partai Golkar ini.

Kepada BPKAP, Bamsuet meminta segera melakukan pembicaraan bilateral secara intensif dengan Parlemen Malaysia. Tujuannya sama, untuk mencari solusi terhadap upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD tersebut.

Ajak IPU Perkuat Tata Kelola Migran

Dalam sesi debat umum di Sidang IPU, Bamsuet mendesak para anggota parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tata kelola global terkait migrasi. Tata kelola tersebut harus memerhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional.

"Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya," paparnya.

"Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu, kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang."